

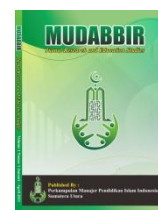


# JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

## Analisis Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Negara dalam Menjawab Tantangan Pergeseran Budaya Akibat Teknologi di Masa di Sekolah Dasar

Vidiani Sembiring<sup>1</sup>, Yakobus Ndona<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: [vidianisemb@gmail.com](mailto:vidianisemb@gmail.com)<sup>1</sup>, [Yakobusndona@unimed.ac.id](mailto:Yakobusndona@unimed.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Pendidikan demokrasi di sekolah dasar merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter dan kompetensi kewarganegaraan sejak dini. Pendidikan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, penghargaan terhadap perbedaan, kesetaraan, serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan kolektif. Namun, dalam konteks era digital yang ditandai dengan arus informasi yang sangat cepat, luas, dan tidak selalu terverifikasi, proses pengajaran nilai-nilai demokrasi di sekolah dasar menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Anak-anak generasi digital atau *digital natives* sejak usia dini sudah terbiasa mengakses informasi dari berbagai sumber digital, terutama media sosial dan platform internet lainnya. Akibatnya, siswa menjadi lebih kritis terhadap informasi dan otoritas, namun belum dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Tantangan ini semakin diperparah dengan keterbatasan guru dalam memahami serta mengadaptasi metode pembelajaran demokrasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan karakteristik siswa saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan utama dalam mengajarkan demokrasi kepada siswa sekolah dasar di era digital, serta menawarkan solusi dan strategi pembelajaran yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan telaah literatur terkini, artikel ini menemukan bahwa tantangan utama terletak pada: perubahan pola pikir dan karakter siswa yang lebih kritis dan otonom; banjir informasi digital yang menyebabkan kebingungan, misinformasi, dan bahkan apatisme; rendahnya literasi digital siswa; serta metode pembelajaran demokrasi yang masih konvensional dan tidak partisipatif. Sebagai solusi, artikel ini merekomendasikan pendekatan pembelajaran demokratis yang berbasis pada praktik nyata, integrasi media digital dalam kelas, pelatihan literasi digital sejak dini, serta peningkatan kapasitas guru dalam mengelola pembelajaran berbasis demokrasi digital. Dengan

pendekatan yang holistik dan adaptif, pendidikan demokrasi di sekolah dasar dapat lebih efektif dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran demokratis yang kuat, kritis, dan bertanggung jawab.

**Kata kunci :** *Pendidikan Demokrasi, Sekolah Dasar, Era Digital, Siswa Kritis, Literasi Digital, Tantangan Pedagogis.*

## ABSTRACT

*Democracy education in elementary schools is an important part of character building and citizenship competency from an early age. This education aims to instill values such as freedom of opinion, respect for differences, equality, and active involvement in collective decision-making. However, in the context of the digital era which is characterized by a very fast, broad, and not always verified flow of information, the process of teaching democratic values in elementary schools faces increasingly complex challenges. Children of the digital generation or digital natives have been accustomed to accessing information from various digital sources since an early age, especially social media and other internet platforms. As a result, students become more critical of information and authority, but are not yet equipped with adequate digital literacy skills. This challenge is further exacerbated by the limitations of teachers in understanding and adapting democratic learning methods that are in accordance with current technological developments and student characteristics. This article aims to identify and analyze the main challenges in teaching democracy to elementary school students in the digital era, and to offer relevant solutions and learning strategies. Using a qualitative approach based on literature studies and current literature reviews, this article finds that the main challenges lie in changes in students' mindsets and characters to be more critical and autonomous a flood of digital information that causes confusion, misinformation, and even apathy low digital literacy of students; and democratic learning methods that are still conventional and non-participatory. As a solution, this article recommends a democratic learning approach based on real practices, integration of digital media in the classroom, early digital literacy training, and increasing teacher capacity in managing digital democracy-based learning. With a holistic and adaptive approach, democratic education in elementary schools can be more effective in forming a young generation that is not only technologically literate, but also has a strong, critical, and responsible democratic awareness.*

**Keywords:** *Democracy education, elementary school, digital era, critical students, digital literacy, pedagogical challenges*

## PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk generasi masa depan yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, bertanggung jawab, dan mampu hidup dalam masyarakat yang majemuk. Salah satu aspek penting dalam pendidikan karakter adalah pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi bukan sekadar mengenalkan sistem pemerintahan atau proses pemilihan umum, tetapi merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial-politik.

Sekolah dasar merupakan fase awal yang sangat strategis dalam membentuk fondasi nilai-nilai tersebut. Pada usia ini, anak-anak mulai membentuk pola pikir dan sikap sosial yang akan terbawa hingga dewasa. Oleh karena itu, mengenalkan dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi sejak dini menjadi tugas penting lembaga pendidikan, terutama sekolah dasar. Melalui kegiatan sederhana seperti musyawarah kelas, pemilihan ketua kelas, atau diskusi kelompok, siswa dilatih untuk menghargai perbedaan pendapat, belajar bekerja sama, dan berlatih mengambil keputusan secara bersama.

Namun, realitas pendidikan demokrasi di sekolah dasar di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Pendekatan pengajaran yang cenderung normatif dan bersifat hafalan membuat siswa hanya mengenal konsep demokrasi secara teoritis, tanpa menghayatinya sebagai nilai yang hidup. Guru masih menjadi pusat otoritas penuh di kelas, sehingga ruang untuk partisipasi siswa dalam proses pembelajaran menjadi terbatas. Dalam banyak kasus, praktik pendidikan demokrasi hanya menjadi formalitas administratif tanpa makna yang dalam bagi peserta didik.

Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika kita masuk ke era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam pola kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Anak-anak yang lahir dan tumbuh di era digital dikenal sebagai generasi digital (*digital natives*). Mereka terbiasa mengakses informasi secara cepat melalui internet, memiliki kecenderungan berpikir kritis terhadap informasi, serta lebih aktif dalam berpendapat melalui media sosial dan platform digital lainnya. Paparan terhadap informasi global membuat siswa lebih terbuka terhadap beragam perspektif dan nilai-nilai, termasuk nilai-nilai demokrasi. Namun, hal ini juga membuka celah baru: siswa bisa terpengaruh oleh informasi yang tidak benar (*hoaks*), ujaran kebencian, atau ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Sementara itu, kesiapan sekolah dalam menghadapi perubahan ini masih belum optimal. Banyak sekolah dasar di Indonesia belum memiliki infrastruktur digital yang memadai, apalagi strategi pembelajaran yang memadukan nilai-nilai demokrasi dengan pendekatan digital. Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, sering kali belum memiliki kompetensi literasi digital yang cukup. Mereka kesulitan membedakan antara penggunaan teknologi untuk tujuan instruksional semata dengan penggunaan teknologi sebagai medium untuk membentuk kesadaran demokratis siswa. Akibatnya, ketimpangan antara karakter siswa yang semakin kritis dan digital dengan pendekatan pembelajaran yang konvensional makin melebar.

Siswa di era digital tidak hanya berhadapan dengan buku pelajaran, tetapi juga dengan dunia maya yang luas dan tak terbatas. Mereka bisa mengakses berbagai informasi tentang politik, hukum, agama, dan sosial secara langsung tanpa filter. Kondisi ini menuntut adanya pendidikan demokrasi yang tidak hanya mengajarkan prosedur dan nilai, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, memilah informasi, serta memahami perbedaan dan konflik secara sehat. Kemampuan ini menjadi sangat penting

untuk menangkal dampak negatif dari media digital seperti radikalisme, intoleransi, dan polarisasi opini.

Pendidikan demokrasi di sekolah dasar juga harus mampu menjawab kebutuhan siswa yang ingin didengar, dihargai, dan dilibatkan. Dalam ruang kelas yang demokratis, siswa bukan hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi subjek aktif yang dapat menyampaikan pendapat, bertanya, dan bernegosiasi dengan guru serta teman sekelasnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan kritis, yang menyatakan bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses dialogis, bukan sekadar transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Dalam konteks ini, pendidikan demokrasi tidak dapat dilakukan secara otoriter atau satu arah.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses dialogis dalam pembelajaran masih menjadi tantangan. Budaya sekolah yang hirarkis, kurangnya pelatihan guru dalam pedagogi kritis, serta ketakutan akan 'siswa yang terlalu kritis' menjadi hambatan dalam membangun ekosistem pendidikan demokratis. Padahal, sikap kritis bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan potensi yang perlu diarahkan agar siswa mampu menyuarakan pendapat secara bertanggung jawab dan etis. Kemampuan ini akan sangat relevan dalam membentuk warga negara yang aktif, bukan pasif.

Selain itu, implementasi pendidikan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-budaya dan politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, membutuhkan pendekatan pendidikan demokrasi yang sensitif terhadap perbedaan. Sayangnya, belum semua sekolah dasar memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk memahami dan merayakan keberagaman ini. Pendidikan multikultural masih belum terintegrasi secara kuat dalam pembelajaran, padahal hal ini merupakan fondasi penting dari demokrasi.

Lebih lanjut, kurikulum nasional saat ini telah mencantumkan aspek pendidikan karakter, termasuk nilai-nilai demokrasi, dalam berbagai mata pelajaran, terutama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namun, dalam praktiknya, pelajaran PPKn sering kali hanya diisi dengan hafalan konsep tanpa penguatan pada keterampilan hidup demokratis. Guru masih terjebak pada pendekatan ceramah dan kurang memberikan ruang bagi siswa untuk berdiskusi, mempertanyakan, atau mengalami langsung proses demokrasi.

Di era digital, pembelajaran demokrasi bisa dikembangkan melalui pendekatan berbasis proyek, diskusi daring, pemanfaatan media sosial sebagai wahana ekspresi pendapat, serta simulasi demokrasi melalui game edukatif atau voting digital. Namun, semua ini memerlukan kesiapan dari berbagai sisi: ketersediaan perangkat teknologi, pelatihan guru, kebijakan sekolah yang mendukung, serta keterlibatan orang tua.

Masalah lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesenjangan digital. Tidak semua siswamemiliki akses yang sama terhadap teknologi. Di daerah-daerah terpencil atau sekolah-sekolah dengan anggaran terbatas, penggunaan teknologi masih sangat minim. Hal ini menyebabkan munculnya ketimpangan dalam penerimaan pendidikan demokrasi berbasis digital. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa strategi

pembelajaran demokrasi di era digital tidak memperlebar jurang ketimpangan pendidikan.

Melihat kompleksitas tantangan yang dihadapi, diperlukan upaya yang sistematis dan kolaboratif untuk memperkuat pendidikan demokrasi di sekolah dasar. Pemerintah, guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu membangun sinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, partisipatif, dan kontekstual. Pendidikan demokrasi tidak bisa lagi dianggap sebagai tanggung jawab guru PPKn semata, tetapi harus menjadi bagian dari budaya sekolah secara keseluruhan.

Di tengah tantangan ini, penting juga untuk menumbuhkan optimisme. Generasi digital memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial yang positif. Mereka terbuka terhadap gagasan baru, mampu berpikir mandiri, dan tidak takut untuk menyuarakan pendapat. Dengan bimbingan yang tepat, mereka bisa menjadi warga negara yang demokratis, toleran, dan peduli terhadap sesama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan-tantangan utama dalam mengajarkan demokrasi kepada siswa sekolah dasar di era digital. Kajian ini juga bertujuan untuk menawarkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang relevan dengan karakteristik generasi digital, dengan harapan dapat memperkuat praktik pendidikan demokrasi yang lebih kontekstual dan bermakna di tingkat pendidikan dasar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menggali secara mendalam tantangan dan strategi pengajaran pendidikan demokrasi di sekolah dasar, khususnya dalam menghadapi karakteristik siswa yang semakin kritis di era digital. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat konseptual dan membutuhkan analisis yang komprehensif terhadap literatur yang relevan, baik dari aspek teori, praktik pendidikan, hingga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pendidikan dasar.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen dan literatur ilmiah yang relevan, seperti:

- Artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas pendidikan demokrasi, pendidikan karakter, literasi digital, dan pedagogi kritis;
- Buku-buku akademik yang membahas teori demokrasi, pendidikan kewarganegaraan, serta perkembangan psikologis siswa sekolah dasar;
- Laporan kebijakan dari lembaga pendidikan dan pemerintah terkait penerapan kurikulum nasional, pendidikan karakter, dan transformasi digital dalam pendidikan;
- Hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini;

- Dokumen kurikulum, modul pembelajaran, dan perangkat ajar yang digunakan di sekolah dasar di Indonesia.

Literatur yang dipilih difokuskan pada publikasi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi terhadap dinamika era digital dan perubahan sosial yang menyertainya. Namun, literatur klasik yang relevan, seperti teori Paulo Freire tentang pendidikan kritis dan konsep pendidikan demokratis dari John Dewey, juga digunakan sebagai landasan teoritis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran dokumen melalui basis data ilmiah seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, *ERIC*, *SINTA*, dan *DOAJ*. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi: *democratic education*, *civic education in elementary school*, *digital literacy in education*, *critical students*, *digital era*, dan *democracy and digital citizenship*. Semua sumber yang dipilih dievaluasi dari segi relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap pengembangan kerangka analisis dalam penelitian ini.

Selain itu, beberapa dokumen kebijakan pendidikan di Indonesia, seperti Kurikulum Merdeka dan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), juga dikaji untuk memperoleh gambaran konteks aktual pendidikan demokrasi di tingkat sekolah dasar.

Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi penting yang berkaitan dengan konsep, tantangan, serta praktik pendidikan demokrasi di era digital. Analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama seperti: (1) karakteristik siswa digital, (2) tantangan guru dalam menerapkan pembelajaran demokratis, (3) hambatan struktural dan kultural dalam pendidikan dasar, dan (4) strategi pembelajaran yang inovatif dan kontekstual.

Setelah tema-tema utama terbentuk, peneliti melakukan sintesis kritis terhadap hasil temuan dengan mengaitkan antara teori dan praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan permasalahan, tetapi juga memberikan solusi konseptual dan aplikatif yang dapat dijadikan rujukan oleh pendidik, pembuat kebijakan, dan peneliti lain di bidang pendidikan dasar.

Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif dan berbasis dokumen, validitas data tetap dijaga melalui teknik triangulasi sumber. Peneliti membandingkan berbagai sumber yang membahas isu serupa untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi. Selain itu, proses refleksi kritis juga digunakan untuk mengevaluasi potensi bias dalam penafsiran data, serta memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik bersifat objektif dan berbasis pada data yang sah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan demokrasi di sekolah dasar telah lama menjadi bagian dari misi besar pendidikan nasional Indonesia dalam menyiapkan warga negara yang berkarakter, aktif, dan bertanggung jawab. Namun, implementasi pendidikan demokrasi tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang terjadi, terutama di era digital. Hasil kajian dari literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang signifikan dalam pengajaran demokrasi kepada siswa sekolah dasar, khususnya yang menunjukkan karakter kritis dan aktif akibat paparan digital yang intens. Bagian ini membahas hasil kajian dalam lima subtema utama, yaitu: (1) karakteristik siswa kritis di era digital; (2) keterbatasan pedagogi demokratis di sekolah dasar; (3) hambatan struktural dan kultural; (4) literasi digital sebagai penunjang pendidikan demokrasi; dan (5) strategi alternatif dalam membangun pembelajaran demokratis berbasis digital.

Generasi siswa saat ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka dikenal sebagai generasi digital atau *digital natives*, yang sejak usia dini telah terbiasa dengan penggunaan perangkat digital seperti smartphone, tablet, dan laptop. Ketersediaan akses terhadap informasi secara bebas melalui internet membuat mereka lebih cepat mengetahui isu-isu lokal maupun global. Hal ini berimplikasi pada terbentuknya karakter siswa yang lebih terbuka, kritis, dan berani menyuarakan pendapat.

Namun, karakter kritis ini tidak serta-merta menunjukkan kedewasaan berpikir atau kedalaman literasi. Siswa usia sekolah dasar berada dalam tahap perkembangan kognitif operasional konkret, di mana kemampuan berpikir logis baru mulai berkembang. Paparan informasi yang begitu masif melalui media sosial sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan menyaring dan memahami konteks. Akibatnya, muncul sikap skeptis tanpa dasar, mispersepsi, dan bahkan konflik dengan otoritas (guru atau orang tua) yang dianggap tidak sejalan dengan informasi yang mereka terima.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam membentuk ruang kelas demokratis. Di satu sisi, guru diharapkan membuka ruang diskusi dan menghargai pendapat siswa. Namun di sisi lain, guru harus mampu mengarahkan diskusi agar tidak keluar konteks atau justru menimbulkan kebingungan dan disinformasi. Tantangan terbesar adalah bagaimana menyeimbangkan antara pemberdayaan siswa dengan pengendalian informasi dan nilai yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Salah satu hasil utama dari kajian ini adalah bahwa praktik pendidikan demokrasi di sekolah dasar masih didominasi oleh pendekatan konservatif. Pendidikan demokrasi lebih sering dipahami sebagai bagian dari pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang diajarkan secara verbalistik dan hafalan. Nilai-nilai seperti musyawarah, kebebasan berpendapat, atau keadilan, disampaikan dalam bentuk definisi, tanpa pengalaman nyata atau ruang untuk praktik langsung.

Pendekatan pembelajaran seperti ini menyebabkan siswa tidak merasakan manfaat konkret dari nilai demokrasi. Mereka cenderung memahami demokrasi sebagai

konsep abstrak yang tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kurangnya praktik demokratis di sekolah, seperti keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan kelas, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler, atau pengelolaan konflik secara dialogis, membuat nilai demokrasi tidak tertanam kuat.

Hal ini diperparah oleh budaya hierarkis yang masih kuat dalam banyak lembaga pendidikan di Indonesia. Guru diposisikan sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan pengambil keputusan di kelas. Siswa yang berani bertanya atau mengkritik dianggap tidak sopan, bukan sebagai bagian dari proses berpikir kritis. Budaya ini bertentangan dengan esensi pendidikan demokratis yang menghargai partisipasi, keberagaman pendapat, dan keterbukaan berpikir.

Selain persoalan pedagogis, hambatan struktural dan kultural juga menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan pendidikan demokrasi di tingkat dasar. Hambatan struktural mencakup kurangnya pelatihan guru dalam bidang pedagogi demokratis dan literasi digital, keterbatasan kurikulum yang fleksibel, dan minimnya sarana digital yang tersedia di sekolah.

Sebagian besar guru belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai pembelajaran demokratis berbasis praktik, apalagi yang dikombinasikan dengan teknologi. Banyak guru yang kesulitan mengembangkan metode diskusi, simulasi, atau proyek kolaboratif karena terbentur tuntutan kurikulum yang padat dan tekanan administratif.

Dari sisi kultural, masih banyak masyarakat—termasuk orang tua siswa—yang belum memahami pentingnya pendidikan demokrasi sebagai bagian dari pembentukan karakter. Ketika siswa mulai menunjukkan sikap kritis, sering kali hal tersebut dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Pandangan ini membuat guru dan sekolah enggan mendorong praktik demokrasi yang lebih terbuka karena takut mendapat resistensi dari orang tua atau masyarakat sekitar.

Literasi digital menjadi elemen penting dalam konteks pendidikan demokrasi di era modern. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap informasi, etika digital, dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab di ruang digital.

Siswa sekolah dasar saat ini berada di tengah arus informasi digital yang deras. Mereka bisa dengan mudah mengakses video tentang pemilu di negara lain, pidato politikus, bahkan perdebatan ideologis di media sosial. Namun, tanpa literasi digital yang kuat, siswa akan kesulitan membedakan antara fakta dan opini, atau antara informasi yang valid dan berita palsu.

Pendidikan demokrasi yang efektif di era digital harus menyertakan pembelajaran literasi digital sebagai komponen utama. Siswa perlu diajarkan bagaimana menilai sumber informasi, mengenali manipulasi opini, serta menyampaikan pendapat secara sopan dan bertanggung jawab di media sosial. Keterampilan ini akan mendukung tumbuhnya warga digital yang demokratis dan cerdas.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, hasil kajian pustaka mengarah pada sejumlah strategi alternatif yang dapat diimplementasikan oleh sekolah dasar untuk memperkuat pendidikan demokrasi yang adaptif terhadap era digital. Beberapa strategi yang diidentifikasi antara lain:

1. Melalui proyek yang melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan penyelesaian masalah bersama, siswa belajar nilai-nilai partisipasi, tanggung jawab, dan kerja sama. Proyek dapat berupa kegiatan sosial di sekolah, pembuatan media kampanye tentang kebersihan, atau simulasi pemilu kelas.
2. Guru dapat menggunakan blog, forum diskusi kelas, voting online, atau game edukatif untuk membangun pengalaman demokratis. Misalnya, menggunakan aplikasi seperti Mentimeter atau Kahoot untuk mengadakan pemungutan suara dalam memilih topik diskusi atau kegiatan kelas.
3. Nilai-nilai demokrasi dan keterampilan digital dapat diintegrasikan ke dalam pelajaran melalui pendekatan tematik. Siswa tidak hanya belajar tentang “hak dan kewajiban warga negara”, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat menyuarakan pendapat melalui media digital secara etis.
4. Guru perlu dilatih tidak hanya dalam aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga dalam membangun relasi yang demokratis dengan siswa. Guru perlu memahami bahwa siswa kritis bukan ancaman, tetapi aset dalam pendidikan demokratis.
5. Pendidikan demokrasi tidak cukup hanya di kelas, tetapi harus menjadi budaya sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum siswa, pelibatan siswa dalam perumusan tata tertib, dan kebijakan sekolah yang transparan serta terbuka terhadap aspirasi siswa.

Temuan dari kajian ini memiliki implikasi langsung terhadap perumusan kebijakan pendidikan dasar di Indonesia. Pemerintah perlu mendorong integrasi literasi digital dan pendidikan demokrasi sebagai kompetensi inti dalam kurikulum nasional. Kurikulum Merdeka yang saat ini dikembangkan dapat menjadi momentum untuk menata ulang pendekatan pembelajaran agar lebih kontekstual, kolaboratif, dan partisipatif.

Selain itu, perlu ada upaya sistematis untuk mengembangkan program pelatihan guru di bidang pedagogi demokratis dan penggunaan teknologi untuk pembelajaran bermakna. Pemerintah daerah dan sekolah juga harus menjalin kemitraan dengan komunitas digital, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menghadirkan inovasi pembelajaran demokrasi di sekolah dasar.

## KESIMPULAN

Pendidikan demokrasi di sekolah dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab di masa depan. Dalam konteks masyarakat digital yang terus berkembang, kebutuhan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini semakin mendesak. Namun, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, proses pengajaran demokrasi kepada siswa sekolah dasar menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama ketika siswa menunjukkan tingkat kekritisian yang tinggi akibat paparan informasi digital.

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama pendidikan demokrasi di era digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, kultural, dan pedagogis. Tantangan-tantangan ini, jika tidak ditangani dengan bijak dan sistematis, berpotensi menciptakan jurang antara nilai-nilai demokrasi yang diajarkan di sekolah dan realitas yang dihadapi siswa di ruang digital mereka.

Dengan demikian, pendidikan demokrasi yang efektif di sekolah dasar pada era digital harus memperhatikan beberapa prinsip utama. Pertama, pendidikan demokrasi harus bersifat partisipatif dan kontekstual, bukan sekadar normatif. Siswa perlu dilibatkan secara aktif dalam berbagai pengambilan keputusan, diskusi kelas, dan proyek bersama. Kedua, pendidikan demokrasi harus diintegrasikan dengan literasi digital. Guru perlu membekali siswa dengan kemampuan menyaring informasi, berpikir kritis terhadap konten digital, serta berperilaku etis di media sosial. Ketiga, pendidikan demokrasi harus menjadi budaya sekolah, bukan hanya pelajaran dalam ruang kelas. Sekolah harus menjadi miniatur masyarakat demokratis, di mana nilai-nilai partisipasi, toleransi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perbedaan benar-benar diterapkan.

Rekomendasi strategis dari simpulan ini adalah perlunya reformasi kebijakan dan praktik pendidikan demokrasi di tingkat dasar, baik dari sisi kurikulum, pelatihan guru, maupun dukungan infrastruktur. Kurikulum nasional perlu lebih memberikan ruang bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi secara praktik dan lintas disiplin. Pelatihan guru harus mencakup pendekatan pedagogi kritis, fasilitasi dialog, serta penggunaan media digital secara bijak dalam pembelajaran. Selain itu, pemerintah dan sekolah harus memastikan bahwa infrastruktur pendukung, baik digital maupun non-digital, tersedia secara merata untuk mendukung proses pembelajaran demokrasi.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa pendidikan demokrasi bukan sekadar pengajaran nilai, tetapi proses membentuk karakter dan membangun budaya yang menjiwai kehidupan bersama. Mengajarkan demokrasi kepada siswa kritis di era digital adalah tantangan sekaligus peluang emas untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Jika proses ini dilakukan secara serius dan terstruktur, sekolah dasar dapat menjadi tempat lahirnya generasi muda yang tidak hanya cerdas dan berprestasi, tetapi juga memiliki kesadaran demokratis, empati sosial, dan semangat untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## REFERENSI

- Ahyar, M., & Ardianto, H. (2021). *Demokrasi dan Pendidikan di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson, J., & Rainie, L. (2020). *The Future of Democracy in the Digital Age*. Pew Research Center.
- Arends, R. I. (2012). *Learning to Teach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Astuti, P. W., & Sari, A. P. (2022). Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 9(2), 130–142. <https://doi.org/10.15294/jppm.v9i2.39201>
- Banks, J. A. (2017). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Budiarto, R. (2020). Literasi digital dalam penguatan karakter siswa sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 7(1), 45–52. <https://doi.org/10.21009/JIPD.071.05>
- Darmawan, H. (2019). Pendidikan demokrasi di sekolah dasar: Tinjauan dari perspektif pedagogik kritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(3), 245–260. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v24i3.1329>
- Frey, C., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254–280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>
- Kemdikbudristek. (2022). *Profil Pelajar Pancasila dan Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Latifah, N. (2020). Internalisasi nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran PPKn di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 112–125. <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i2.30814>
- Lipset, S. M. (2000). *Democracy in Developing Countries*. New York: Routledge.
- Nasution, S. (2011). *Didaktik Asas-asas Mengajar* (Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhadi, D. (2021). Tantangan pendidikan kewarganegaraan di era post-truth dan digital. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/civics.v18i1.37509>
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>
- Setiawan, A., & Lestari, D. (2023). Membangun budaya sekolah demokratis melalui pendekatan partisipatif. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Karakter*, 14(1), 27–38. <https://doi.org/10.21831/jpd.v14i1.54672>
- Siregar, M. (2020). Pendidikan demokrasi di Indonesia: antara gagasan dan praktik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 211–227. <https://doi.org/10.22146/jsp.53645>
- UNESCO. (2015). *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* Paris: UNESCO Publishing.

Yusof, N., & Halim, L. (2022). Civic education and digital citizenship among primary school students: A Malaysian perspective. *Journal of Education and Learning*, 11(3), 320-331. <https://doi.org/10.5539/jel.v11n3p320>